BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN Persero

Kelistrikan di Indonesia di mulai ada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pablik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahu 1927 Pemerintah Belanda membentuk *s'Lands waterkracht Bedrijved* (LB) yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa PLT antara lain :

a. PLTA Plengan
b. PLTA Lamajang
c. PLTA Bengkok Dago
d. PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat
e. PLTA Giringan di Madiun
f. PLTA Tes di Bengkulu
g. PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara
h. PLTU di Jakarta.

Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang

dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang, oleh karana itu perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Setuku dan diploklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini bermanfaat oleh pemuda serta buruh listrik dan gas untuk mengambil perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari Buruh/ Pegawai Listrik dan Gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNPI Pusat yang waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo untuk melapaorkan hasil perjuangan mereka.

Selanjutnya delegasi Kobarsjih bersama-sama dengan Pimpinan KNPI Pusat menghadapt Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepapa Pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan Penetapan Pemerintahan tahun 1945 No. 1 tanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya Agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai kembali oleh Pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor Jawatan

Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan.

Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Kobarsjih tenang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas Swasta kepada Pemerintah. Selanjutnya kristalisasi dari semangat dan jiwa mosi tersebut tertuang dalam Ketetapan Parlemen RI No 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia, jika waktu konsesinya habis.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan banga Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajah Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tertanggal 27 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada ditangan bangsa Indonesia.

Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di Gedung Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Nomor 235/KPTS/1975 tertanggal 30 September 1975

peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jauh pada tanggal 3 Desember.

Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik, maka beedasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 113.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

1.2 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Perjalanan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten cukup panjang. Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Jawa Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu ***Bandungsche Electriciteit Maatschaappij*** **(BEM)**.

Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 Januari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi ***Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng*** **(GEBEO)** yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentah waktu 1942 - 1945, pendistribusian tenaga listrik

dilaksanakan oleh ***Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha*** dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. 27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1959.

Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 dibentuk **Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN)** sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi **PLN Exploitasi XI** sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tangerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi **Perusahaan Umum Listrik Negara**. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi **Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat**.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994, Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama **PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat** sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi **PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.**

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002, PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi **PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten**, di mana **wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten**, hingga saat ini.

1.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

1.3.1 Visi PT. PLN (Persero)

Visi PT. PLN (Persero) DJBB adalah **"Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani".**

Penjabaran :

a. Diakui

Mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak luar

yang menunjukkan bahwa PLN pantas dipandang sebagai Perusahaan Kelas Dunia.

b. Kelas Dunia

a. Menunjukkan kinerja yang melebihi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Memberikan layanan yang mudah, terpadu, dan tuntas dalam berbagai masalah kelistrikan.
c. Menjalin hubungan kemitraan yang akrab dan setara dengan pelanggan serta mitra usaha Nasional dan Internasional.
d. Bekerja dengan pola pikir prima (*Mindset of Excellence*).
e. Diakui oleh pelanggan dan mitra kerja sebagai perusahaan yang mampu memenuhi standar mutakhir dan paling baik.

c. Bertumbuh-kembang

a. Antisipatif terhadap perkembangan lingkungan usaha dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
b. Secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik.

d. Unggul

a. Menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolok ukur mutakhir dan terbaik.
b. Memposisikan diri sebagai Perusahaan yang terkemuka dalam percaturan bisnis kelistrikan dunia.
c. Mengelola usaha dengan mengedepankan pemberdayaan potensi insani secara maksimal.

d. Meningkatkan kualitas proses, sistem, produk, dan pelayanan secara berkesinambungan.

e. Terpercaya

a. Memegang teguh etika bisnis yang tertinggi.

b. Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten.

c. Menjadi Perusahaan pilihan.

f. Potensi Insani

a. Keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh kesadaran anggota perusahaan untuk memunculkan seluruh potensi mereka dalam wujud wawasan aspiratif dan etikal, rasa kompeten, motivasi kerja, semangat belajar inovatif dan semangat bekerja sama.

b. Potensi insani diperkaya dengan kompetensi yang terbentuk dari pengetahuan substantial, pengetahuan kontekstual, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan jenjang kerja sama.

Konsekuensi Visi terhadap strategi korporat :

a. Mewujudkan kinerja Perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dalam usaha bisnis kelistrikan.

b. Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang maksimal.

c. Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentransformasikan potensi mereka menjadi kinerja Perusahaan yang dihargai tinggi.

1.3.2 Misi PT. PLN (Persero)

a. **Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.**

   Konsekuensi terhadap strategi korporat :

   1. Mencari dan memanfaatkan peluang usaha secara berkesinambungan di bidang bisnis kelistrikan dan usaha lain yang terkait.
   2. Mengembangkan budaya pelayanan.
   3. Menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
   4. Anggota Perusahaan perlu menyadari bahwa bisnis kelistrikan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   5. Berusaha secara konsisten untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kelistrikan.

b. **Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.**

   Konsekuensi terhadap strategi korporat :

   1. Mengembangkan dan menjalankan bisnis kelistrikan sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat.
   2. Mengembangkan usaha kelistrikan yang selaras dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di pasar yang kompetitif.

c. **Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.**

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif.
2. Memacu pemanfaatan energi listrik secara tepat guna dan memberikan nilai tambah bagi sektor ekonomi.
3. Menjadi pelopor dalam membangun masyarakat yang sadar dan cinta lingkungan.

d. **Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.**

Konsekuensi terhadap strategi korporat :

1. Membangun dan mengoperasikan fasilitas kelistrikan yang akrab dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial.
2. Menjaga dan memelihara semua fasilitas kelistrikan sehingga tidak mencemari lingkungan.

1.4 Motto dan Tujuan PT. PLN (Persero)

1.4.1 Motto PT. PLN (Persero)

Dalam menjalankan perusahanannya sebagai pemasok listrik keseluruh wilayah Indonesia khususnya Distribusi Jawa Barat dan Banten, PT. PLN mempunyai Motto sebagai berikut :

"Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik (*Electricity for a Better Life*)"

1.4.2 Tujuan PT. PLN (Persero)

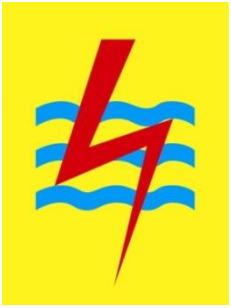
Tujuan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasaan pelanggan.

1.5 Logo PT. PLN (Persero)

Bentuk, warna dan makna lambang Perusahaan resmi yang digunakan adalah sesuai yang tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 031/DIR/76 Tanggal, 1 Juni 1976, mengenai Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

Gambar 1.1

Logo PT. PLN (Persero)



Sumber : www.pln-jabar.co.id

Keterangan Logo PT. PLN (Persero) :

1. **Bidang Persegi Panjang Vertikal**

Melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga

melambangakan semangat menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

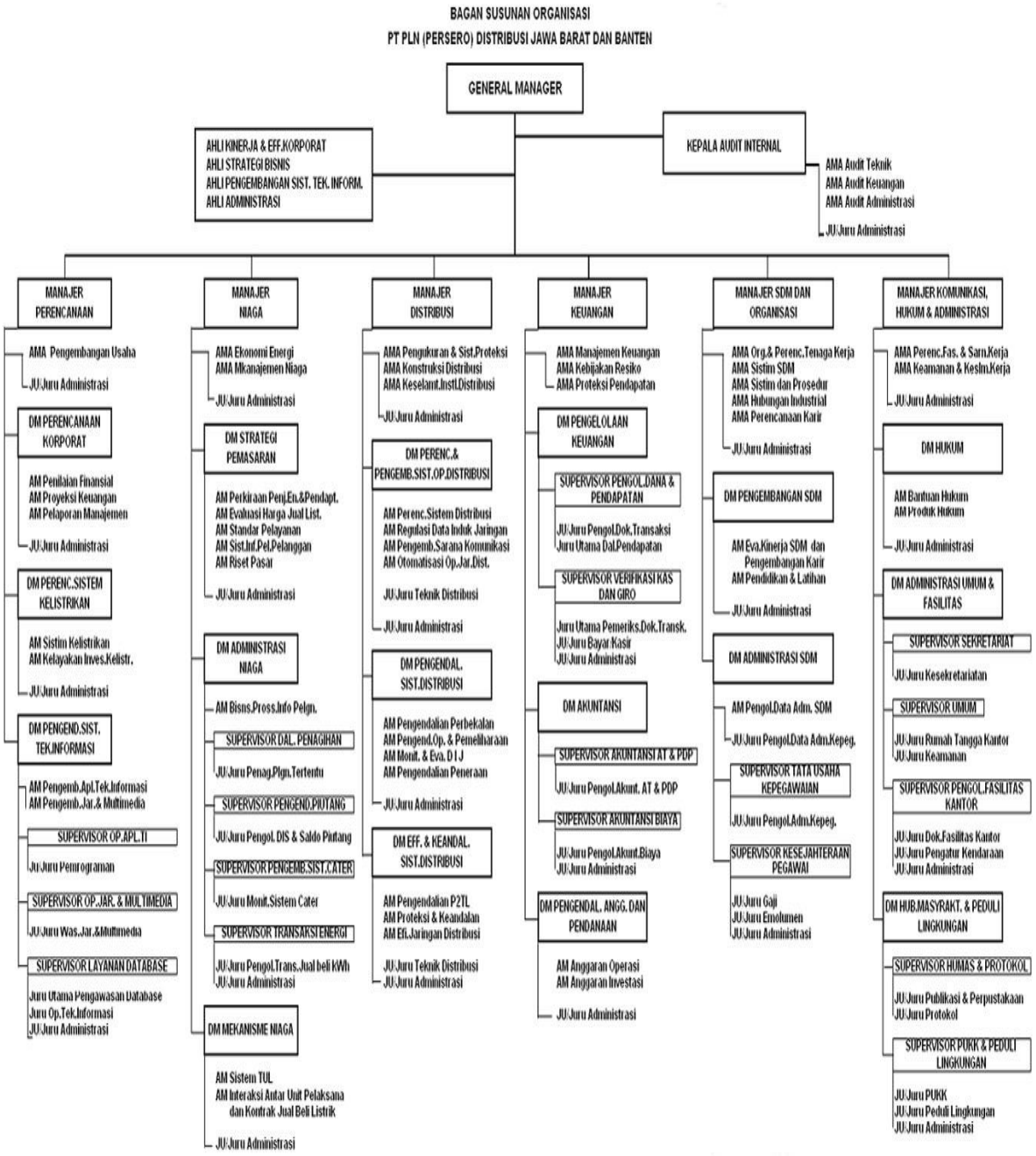
2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam mengahadapi tantangan perkembangan jaman.

3. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti yaitu Pembangkitan, Penyaluran dan Distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT. PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten



Sumber : Kantor PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten

1.6 *Job Descriptions* dari PT. PLN (Persero)

General Manager

1. Memimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten
2. Membentuk Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) yang membawahi Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ), Unit Jaringan (UJ)
3. Menetapkan Formasi Jabatan dan Informasi Tenaga Kerja Manajer Bidang dan Kepala Audit Internal
4. Menetapkan formasi jabatan dan informasi kerja Manajer Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD)

Keputusan General Manager No. 101.K/021/GM.DJBB/2004 pada tanggal 24 November 2004, mengenai uraian fungsi bidang-bidang dan Audit Internal pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten:

1. **Bidang Perencanaan**
    a. Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
    b. Menyusun rencana pengembangan system ketenaga listrikan;
    c. Menyusun system manajemen kinerja unit-unit kerja;
    d. Menyusun metoda evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya;
    e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyadang dana, baik secara bilateral maupun multilateral;

f. Menyusun rencana pengembangan system teknologi informasi;
g. Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi system informasi;
h. Menyusun laporan manajemen;
i. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penerapan pengaturannya.

2. Bidang Niaga

a. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran;
b. Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan;
c. Menevaluasi harga jual listrik;
d. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik;
e. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan;
f. Menyusun standar dan produk pelayanan;
g. Menyusun ketentuan data induk pelanggan dan data induk saldo serta kontrak jual beli tenaga listrik;
h. Mengkaji pengolaan pencatatan meter dan menyusun rencana penyempurnaannya;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu, antara laian TNI/POLRI dan instalasi fertikal;
j. Melakukan pengandaliaan DIS dan opname saldo piutang;
k. Menyusun konsep kebijakan system informasi pelayanan pelanggan;
l. Menyusun mekanisme interaksi antara unit pelaksana.

3. Bidang Distribusi

a. Menyusun rencana pengembangan system jaringan distribusi dan membina penerapannya;
b. Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan;
c. Menyusun SOP untuk peneraan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi;
d. Menyusun disain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya;
e. Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta sarana perbaikannya;
f. Menyusun metoda kegiatan konstruksidan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya;
g. Menyusun kebijakan menejemen jaringan distribusi dan kebijakan menejemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya;
h. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi;
i. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data induk jaringan (DIJ).

4. Bidang Keuangan

a. Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan;
b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran kas pembiayaan;
c. Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsilidasi;
d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset;
e. Melakukan pengelolaan keuangan;
f. Menyusun laporan menejemen di bidangnya.

5. Bidang SDM dan Organisasi

a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaanya;
b. Menyusun kebijakan menejemen sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaanya;
c. Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaanya;
d. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia;
e. Menyusun laporan menejemen di bidangnya.

6. Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi

a. Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal;
b. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, system pengamanan dan menejemen kantor;
c. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan *community development*;
d. Menyusun kebijakan administrasi;
e. Menyusun dan mengkaji produk-produk hokum dan peraturan-peraturan perusahaan;
f. Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan;
g. Menyusun standart fasilitas kantor;
h. Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja;
i. Mengelola kesekertariatan dan rumah tangga kantor induk;
j. Menyusun laporan menejemen di bidangnya.

7. Audit Internal

a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan, sesuai program kerja perusahaan;
b. Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, menejemen dan sumber daya manusia;
c. Memberikan masukan dan rekomendasi yang menyangkut prose menejemen dan operasional;

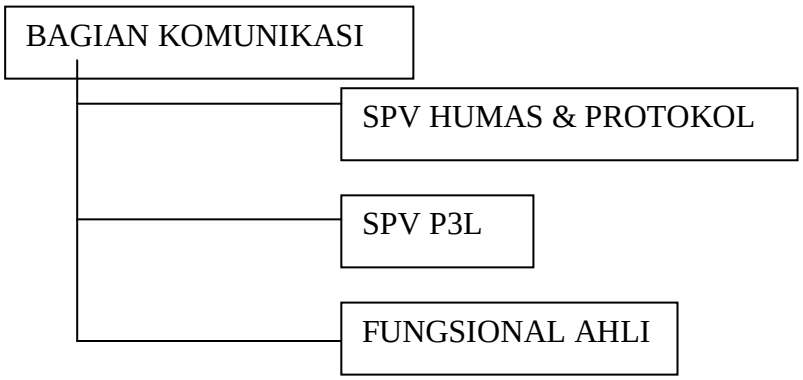
d. Memonitor tindak lanjut temuan hasil audit internal;

e. Menyusun laporan menejemen di bidangnya.

1.7 Struktur Divisi Humas PT. PLN (Persero)

Dalam menjalankan perusahaannya PT. PLN (Persero) mempunyai Birokrasi yang baik agar mengarah kearah kerja yang lebih baik. Untuk itu disusun struktur yang ada di bagian Humas PT. PLN (Persero) yaitu :

Bagan 1.1
Struktur Divisi Humas PT. PLN (Persero)



Sumber : www.pln-jabar.co.id

Bagian *Public Relations* atau Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten mambawahi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Humas dan Protokol

Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan hubungan internal & eksternal PT. PLN (Persero) termasuk di dalamnya mengurus kegiatan upacara rutin.

2. Nagian P3L

   P3L merupakan singkatan dari Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (Community Development). Program ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membangun dukungan dan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan keselamatan asset PLN yang terpasang di banyak tempat. Program ini diwujudakn dalam bentuk pemberian bantuan social bagi masyarakat.

3. Fungsional Ahli

   Tugasnya membantu melaksanakan kegiatan hubungan internal dan eksternal PR sesuai dengan keahliannya.

1.8 Sarana dan Prasarana PT. PLN (Perseso)

1.8.1 Sarana PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

A. Gedung perkantoran yang terdiri dari 2 gedung yaitu; gedung lama dan gedung baru/ gedung tambahan.

B. Ruang perkantoran yang terdiri dari 4 lantai, yaitu :

   a. Gedung baru / gedung tambahan lantai dasar dari : Ruang serbaguna dan FO (*Front Office*) sedangkan di sisi lain terdapat ruang divisi humas, ruang penyimpanan fasilitas kantor dan

gedung, perpustakaan, gudang alat tulis kantor, ruang *e-procurement* (pengadaan barang melalui system computer), ruang teknik koperasi distribusi.

b. Gedung baru / gedung tambahan lantai 2 terdiri dari Ruang PSDM, ruang Admin SDM, Ruang bagian keuangan, ruang bagian perencanaan perusahaan, dan ruang hokum.
c. Gedung lama lantai 3 terdiri dari : Ruang bagian niaga, akuntansi, anggaran dan kesekertariatan umum.
d. Gedung lama lantai 4 terdiri dari : ruang system operasi distribusi, ruang proyek pengadaan listrik pedesaan , dan ruang serbaguna kecil.

Adapun sarana lain dari PT. PLN DJBB yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Sarana PT. PLN (Persero) DJBB

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Mesjid	1
2	Ruang *Security*	2
3	*Front Office*	1

4	Ruang Rapat	1
5	Aula	1
6	Lift Gudang	2
7	Tangga Darurat	3
8	Tempat Parkir	2
9	Toilet	10
10	Telepon Umum	1
11	Mesin Fotocopy	2
12	ATM BNI	1
13	Kantin	1

Sumber : *Company Profile* PT. PLN (Persero) DJBB

1.8.2 Prasarana PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Prasarana yang tersedia di tempat pelaksanaan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yaitu di bagian Humas PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang terdapat digedung lama berada di lantai dasar yaitu Ruang Divisi Humas serta Perpustakaan. Adapun fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Prasarana Humas PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Barat dan Banten

NO	NAMA FASILITAS KERJA	JUMLAH	SATUAN	PENEMPATAN
1	Komputer Program	1	Unit	Deputy Manager

	Windows XP			Komunikasi
2	Komputer Program Windows XP (Flat)	5	Unit	Operasional Humas
3	Komputer Program Windows XP	2	Unit	Operasional Humas
4	Komputer Program Windows XP	1	Unit	Operasional Perpustakaan
5	Laptop (Note Book)	2	Unit	Operasional Humas
6	Printer HP	1	Unit	Deputy Manager Komunikasi
7	Printer HP	5	Unit	Operasional Humas
8	Printer HP	1	Unit	Operasional Perpustakaan
9	Print+Scan+Fotocopy	1	Unit	Operasional Humas
10	Print+Scan+Fotocopy	1	Unit	Operasional Perpustakaan
11	Scan	1	Unit	Operasional Perpustakaan
12	Faximili	1	Unit	Operasional Humas
13	Infocus	1	Unit	Operasional Humas
14	Mesin Tik	1	Unit	Operasional Humas
15	Kamera Digital (Tgtg): Nikon D-100	1	Unit	Operasional Humas
16	Kamera Digital : Sony Cybershot	1	Unit	Operasional Humas
17	Kamera Digital : Panasonic DMC-LC 33	1	Unit	Operasional Humas
18	Kamera Digital : Nikon 2 MP1	1	Unit	Operasional Humas
19	Kamera Digital : Nikon Cool Pix 880	1	Unit	Operasional Humas
20	Kamera Digital :	1	Unit	Operasional Humas

	Nikon Cool Pix 895			
21	Kamera Manual (Tele): Canon 505	1	Unit	Operasional Humas
22	Kamera Manual (Tele): Nikon F 10	1	Unit	Operasional Humas
23	Kamera Manual : Nikon	1	Unit	Operasional Humas
24	Lensa Tele : Nikon	3	Unit	Operasional Humas
25	Lensa Tele : Canon	2	Unit	Operasional Humas
26	Tripod	3	Unit	Operasional Humas
27	Digital Recorder Samsung Digital	1	Unit	Operasional Humas
28	Pointers : Peltra	2	Unit	Operasional Humas
29	Handycam ; Sony Nightshot	1	Unit	Operasional Humas
30	Portable DVD : Shinco	1	Unit	Operasional Humas
31	Tape Recorder : Sony 2X Rec	1	Unit	Operasional Humas
32	VCD Player	1	Unit	Operasional Humas
33	Televisi 29 Inch	1	Unit	Operasional Humas
34	Televisi 20 Inch	1	Unit	Operasional Perpustakaan
35	Kulkas	1	Unit	Deputy Manager Komunikasi
36	Fasilitas Internet dan Intranet	1	Unit	Operasional Gedung

Sumber : Data Inventaris Humas PT. PLN (Persero) DJBB

1.9 Lokasi dan Waktu PKL

1.9.1 Lokasi PKL

PKL dilaksanakan di Bagian Humas PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten yang berlokasi Jl. Asia Afrika no. 63 Bandung 40111. Telp. 62-022-4230747. Fax. 62-022-4230822, 4240834, Website : www.pln-jabar.co.id

1.9.2 Waktu PKL

PKL terhitung mulai tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, dalam waktu 5 hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jum'at, dimana setiap hari dan kerjanya dimulai dari pukul 07.30-16.30 WIB.